

Abstrak

Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia serta beberapa negara diantaranya yaitu Cina, Inggris, Amerika Serikat, dan Nigeria. Dalam melakukan tinjauan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan dengan bersumber pada undang-undang dan peraturan negara terkait, terfokus pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa kelembagaan PBJP di Indonesia memiliki bentuk terstruktur yang bernama Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di setiap level kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. UKPBJ dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Fungsional. Kelembagaan PBJP dinegara lainnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelembagaan PBJP Indonesia, namun disamping itu terdapat pula beberapa kesamaan. Tinjauan ini diharapkan dapat membantu penelitian-penelitian kedepannya.

Kata kunci: kelembagaan, pengadaan, UKPBJ

Abstract

This review aims to provide an overview of the government's goods and services procurement institutions in Indonesia and several countries including China, the United Kingdom, the United States, and Nigeria. In conducting this review, the author uses a literature study method based on relevant state laws and regulations, focusing on Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning PBJP and its amendments, namely Presidential Regulation Number 12 of 2021. The results of the review show that PBJP institutions in Indonesia have a structured form called the Goods and Services Procurement Unit (UKPBJ) at every level of ministries, institutions, and local governments. UKPBJ in carrying out its duties and functions is assisted by the Election Working Group and Functional Officers. PBJP institutions in other countries have different characteristics from Indonesian PBJP institutions, but besides that there are also some similarities. This review is expected to help future research.

Keywords: institutions, procurement, UKPBJ